

**ANALISIS KOMPARATIF NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
DALAM BUKU PAKET PAI-BP KELAS VI SD/MI
ANTARA TERBITAN KEMENDIKBUD DAN KEMENAG**

Bey Arifin Sidon¹, Ahmad Aziz Fanani²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: beyarifin.ba@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and compare the contents of the content of multicultural education values in the student package book "Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VI SD/MI" between the publications of the Ministry of Education and Culture as book 1, and those published by the Ministry of Religion as book 2. This research includes comparative research using a qualitative approach and types of library research. Data collection was carried out by reviewing documents in the form of a package book "Islamic Religious Education and Ethics Class VI SD/MI" published by the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religion. Data analysis techniques include content analysis. Checking the validity of the data is carried out by means of the researcher's diligence technique and the technique of discussing with peers. The results showed that the two books contain multicultural educational values which include; tolerance, justice, equality, democracy, and pluralism, and in book 2 there is an additional value of humanism. Based on the results of this study, it shows that the two books present multicultural education-based PAI material which is a representation of the government's efforts through the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religion to realize the stability of social order, especially in the world of education.

Keywords: Multicultural Education, PAI Book, Ministry of Education & Culture & Ministry of Religion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan isi isi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam buku paket siswa "Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VI SD/MI" antara publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai buku 1, dengan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai buku 2. Penelitian ini termasuk penelitian komparasi (perbandingan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen berupa buku paket "Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VI SD/MI" terbitan Kemendikbud dan Kemenag. Teknik analisis data meliputi analisis isi (content

analysis). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara teknik ketekunan peneliti dan teknik berdiskusi dengan teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua buku tersebut memiliki kandungan nilai pendidikan multikultural yang meliputi; toleransi, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan pluralisme, serta pada buku 2 terdapat tambahan nilai humanisme. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kedua buku tersebut menyajikan materi PAI berbasis pendidikan multikultural yang merupakan representasi dari upaya pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag untuk mewujudkan stabilitas ketertiban sosial utamanya dalam dunia pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Buku PAI, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Agama

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Accepted: May 09 2022 | Reviewed: May 12 2022 | Published: June 28 2022 |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|

A. Pendahuluan

Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini tidak hanya sebatas masalah finansial dan kebutuhan pokok yang anjlok di tengah pandemi *Covid-19*. Lebih dari itu, Indonesia juga dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang menjadi landasan fundamental bagi generasi bangsa Indonesia yang majemuk.

Indonesia dengan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetap satu jua, cukup jelas bahwa unsur-unsur masyarakatnya sangat beragam. Sebagaimana penuturan (Luwihita, 2016), bahwasanya keberagaman ini ditengarai dengan adanya jajaran pulau-pulau yang terbentang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan jumlah kurang lebih sekitar 13.000 pulau, baik dalam ukuran besar maupun kecil, ditambah lagi dengan populasi penduduknya yang berjumlah sekitar kurang lebih 240 juta jiwa, terdiri dari 300 suku bangsa dengan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda serta menganut Agama dan kepercayaan yang beragam pula, secara kompleks kemudian dikenal dengan istilah multikultural.

Konsep multikulturalisme merupakan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara serta pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai demokrasi. Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman, melahirkan suatu pola atau pemikiran baru yang dapat memperkokoh dan mempersatukan serta mengakuieksistensi keragaman budaya (Benyamin & Prasetya, n.d.). Multikultural merupakan pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik (Mahfud, 2014). Termasuk diantara bagian dari perbedaan itu meliputi warna kulit, postur tubuh, bahasa, tradisi,

pandangan hidup dan keyakinan agama (Mulkan, 2015). Dari berbagai uraian di atas maka dapat dipahami bahwa multikultural adalah manifestasi keragaman kelompok yang berpotensi dapat menstimulir kemajuan sosial serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu demi keberlangsungan hidup yang damai dengan unsur masyarakat yang majemuk, maka eksistensi Pancasila sebagai dasar negara harus dipertahankan. Sebab situasi multikultur seperti di Indonesia rentan menimbulkan konflik yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan munculnya beragam persoalan kebangsaan yang terus-menerus mewarnai wajah buram bangsa Indonesia saat ini. Diliputi kecemasan dan kekhawatiran mengenai krisis kemanusiaan yang tak sedikit juga melibatkan peserta didik, semisal perundungan antar siswa yang berbeda agama.

Belajar dari pengalaman pahit sejarah kelam yang pernah menimpa bangsa Indonesia, dimana ketika keberagaman tidak dipotensikan dengan baik maka dapat menjadi faktor pemicu konflik yang melumpuhkan sendi-sendi nilai berbangsa dan bernegara. (Luwihta, 2016) mengungkap sejumlah kasus yang cukup sensitif, sebut saja kasus Ambon dan Poso (konflik antar Agama), Sambas dan Sampit (konflik antar etnis Dayak/Melayu dengan Madura), dari tahun 2008-2012, terdapat dua kasus konflik atau kekerasan, pertama menyangkut isu rumah ibadah, kedua mengenai konflik internal agama atau alasan “penodaan agama”, utamanya di kalangan umat Islam yang masih terus mewarnai pola relasi keagamaan di Indonesia.

Dengan demikian, maka timbul tanda tanya besar, apakah benar pendidikan agama mengajarkan kekerasan dan anti keberagaman?. Setiap agama sebagai tuntunan dalam kehidupan individu tentu diyakini mengajarkan konsep yang harmonis, seperti kasih sayang, toleransi, kedamaian dan kerukunan bagi penganutnya. Dalam Islam misalnya, umat muslim diperintah untuk berperilaku santun, toleransi dan saling membantu dengan penuh kasih sayang bukan justru sebaliknya, Islam tidak menganjurkan umatnya agar berperilaku ekstrim, radikal, mengucilkan minoritas, bertindak sewenang-wenang dan intoleran. Maka upaya menumbuhkan kesadaran yang semacam ini sangat krusial untuk menjalani kehidupan yang damai dengan mereka yang berbeda, bukan justru menjadikannya sebagai bahan deskriminasi, kekerasan dan perundungan.

Dalam kerangka inilah seharusnya pendidikan agama harus mendasarinya agar tuding akan ketidakmampuan pendidikan agama dalam menanggapi munculnya sejumlah konflik sosial di tanah air selama ini secara otomatis akan terjawab dengan sendirinya, karena pendidikan agama sebagai salah satu anasir dari kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan dari sekolah dasar bahkan

mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi tidak terlepas dari telaah baik aspek normatif maupun historisnya. Sehingga upaya dalam mengembangkan dan menelaah konten yang disesuaikan berdasarkan zamannya harus terus dilakukan (dikembangkan). Sebagaimana yang termaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (Tahun, 2005).

Dari prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertera pada UU di atas menjadi jelas bahwa pendidikan multikultural sejatinya edukasi dalam memahami hakikat kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan, kehadiran buku paket atau buku teks sebagai media dan sumber pembelajaran yang dapat mentransformasikan ilmu pengetahuan serta nilai kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting dalam menunjang program pembelajaran yang telah digariskan oleh pemerintah sebagaimana kutipan (Tahun, 2005) di atas. Selain metode pembelajaran dan kurikulum, dalam mendukung keberhasilan suatu pendidikan dibutuhkan sarana yang dapat menjadi panduan dalam proses pembelajaran termasuk adanya buku paket tersebut. Buku paket atau biasa disebut juga buku teks menjadi kebutuhan yang pokok bagi guru maupun siswa. Dengan adanya buku paket itu pula guru dapat mempersiapkan materi sebelum proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan bagi peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri ketika tidak ada guru yang mendampingi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 43 ayat 5, disebutkan bahwasanya “Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri” (No, 19AD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, maka dapat dipahami bahwa buku paket sebagai salah satu sarana penunjang pembelajaran yang tergolongkan pada bahan ajar cetak memiliki kriteria tersendiri yang kemudian diselaraskan dengan kurikulum yang diberlakukan dalam hal isi atau konten buku. Disamping itu, di sisi lain bahwa dalam pembuatan buku pelajaran pemerintah telah memberikan standar kelayakan melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Demikian pula dalam buku paket mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP), sudahkah gagasan pendidikan berbasis multikultural teraplikasikan di dalamnya?. Karena pada dasarnya, seorang guru agama tidak hanya dituntut untuk mengajarkan tentang ibadah saja melainkan juga perlu untuk mengajarkan apresiasi terhadap realitas sosial dalam beragama, salah satunya dengan mengacu pada buku paket siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas VI SD/MI yang disosialisasikan serta diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan buku terbitan Kementerian Agama (Kemenag). Buku tersebut keduanya merupakan buku paket yang disajikan oleh pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 (K-13) yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak dibawah koordinasi Kemendikbud dan Kemenag.

Sebagaimana isu konten buku PAI yang belakangan dinilai menyinggung agama lain tengah menjadi perbincangan. Hal ini terkait buku PAI-BP kelas VIII (SMP) dan kelas XI (SMA) dari Kemendikbud tahun 2014 tengah menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, isi buku tersebut dinilai telah menyinggung agama lain, khususnya soal kitab Injil dan Taurat. Maka dalam upaya menjaga stabilitas ketertiban sosial khususnya dalam dunia pendidikan, Kemendikbud terus melakukan evaluasi terkait penyusunan dan pembaruan buku teks peserta didik di satuan pendidikan.

Kemendikbud juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) (Muhyiddin dan Huda, 2021:

<https://repjabar.republika.co.id/berita/qp8rav487/kemendikbud-dan-kemenag-koordinasi-terkait-buku-agama-islam> diakses pada 1 Maret 2021).

Belajar dari fenomena di atas, maka peneliti merasa perlu untuk berkontribusi dalam menganalisis buku PAI-BP khususnya jenjang SD/MI sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama dan moral kehidupan sosial. Karena menurut (S. Anwar, 2014) konten pembelajaran PAI-BP harus digambarkan dan dihubungkan dengan realitas sosial. Sehingga generasi bangsa menyadari kenyataan keberagaman elemen bangsanya agar tidak terjebak pada institusionalisasi agama yang berbahaya.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti bermaksud untuk meneliti, menganalisis dan mengkomparasi nilai-nilai pendidikan multikultural pada buku paket PAI-BP kelas VI SD/MI yang dituangkan dalam judul ***“Analisis Komparatif Nilai Pendidikan Multikultural dalam Buku Paket PAI-BP Kelas VI SD/MI antara Terbitan Kemendikbud dan Kemenag”***.

B. Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Deskriptif Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa narasi/kata-kata tertulis dan tidak berupa angka. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif (Amir, 2020). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu, dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Amir, 2020).

Dalam tahap penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan beberapa langkah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh (Zed, 2014) berikut ini:

1. Menyiapkan alat perlengkapan
Pada poin ini cukup sediakan pensil atau pulpen dan kertas catatan, karena penelitian kepustakaan tidak memerlukan banyak alat perlengkapan.
2. Menyusun bibliografi kerja
Tugas pertama dalam riset kepustakaan sebenarnya mulai dengan menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber utama bibliografi kerja berasal dari koleksi perpustakaan dengan memanfaatkan alat bantu bibliografi yang tersedia di perpustakaan atau lembaga tertentu, selain itu juga dapat menggunakan jasa internet (*website*).
3. Mengatur waktu
Penting bagi seorang peneliti agar membuat skedul waktu tertulis yang realistis sesuai dengan kebutuhan dan irama kerja peneliti, hal ini dimaksudkan agar supaya peneliti terlatih bersikap disiplin dengan waktu.
4. Membaca dan membuat catatan penelitian
Peneliti kepustakaan pasti akan melakukan kegiatan membaca bahan-bahan pustaka yang menjadi konsentrasi penelitiannya. Secara teoretik, membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Kegiatan membaca adalah proses yang kompleks, sedangkan mencatat adalah memindahkan informasi penting dari hasil membaca ke media pencatatan agar mudah dipelajari.

Setelah membaca bahan pustaka yang diteliti, hal yang tak kalah pentingnya adalah mencatat semua informasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kegiatan mencatat setidaknya mencakup tiga hal, yaitu mampu mengidentifikasi gagasan utama dan hubungan antar gagasan dalam suatu paparan, memahami makna di balik gagasan, dan menyajikan setiap gagasan menggunakan bahasa sendiri (Amir, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Buku Paket “PAI-BP Kelas VI SD/MI” antara Terbitan Kemendikbud dan Kemenag Berikut nilai-nilai pendidikan multikultural yang akan dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis mata pelajaran PAI-BP kelas VI SD/MI dari masing-masing buku. Yakni, buku terbitan Kemendikbud yang selanjutnya disebut dengan buku 1 dan buku terbitan Kemenag yang kemudian disebut dengan buku 2.

a. Nilai Toleransi

Dalam istilahnya, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya (Suryan, 2017). Pada nilai toleransi pada buku 1 tersebut terdapat kalimat:

“Nabi Muhammad saw. tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri” (H. & F. G. Anwar, 2018).

Kalimat tersebut merupakan interpretasi dari *Q.S al-Kafirun* yang menjelaskan toleransi dalam beragama. Yang perlu diperhatikan dalam toleransi beragama ini adalah membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya. Bukan menerima ajaran agama lain (Suryan, 2017)

Nilai toleransi yang dalam buku 2 ini juga disadur dari bab 1 yang merupakan interpretasi dari *Q.S al-Kafirun*. pada buku ini terdapat penjelasan:

“Surah al-Kafirun adalah pedoman sikap toleransi dalam Islam. Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Surah *al-Kafirun* juga menjelaskan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing” (Abdullah, 2019).

Pada penggalan kalimat tersebut menjadi cukup jelas bahwa toleransi beragama itu lebih kepada sikap tindakan sosial yakni menjaga ketertiban agama lain dengan tidak menggangukannya. Bukan berarti toleransi diartikan menerima semua ajaran agama dalam hal keyakinan.

Nilai toleransi yang terkandung dalam kedua buku tersebut memiliki persamaan yaitu perihal toleransi dalam beragama. Toleransi Agama dari kedua buku tersebut berdasarkan penjabaran interpretasi dari *Q.S. al-Kafirun* yang digambarkan dengan sikap untuk menghargai seorang non muslim dan bersikap membiarkan mereka untuk melaksanakan ritual keagamaannya masing-masing dengan tetap menjaga kondusifitas sosial dan tidak mengganggu.

Perbedaannya terletak pada buku 1, yang selain memuat toleransi dalam beragama, juga memuat toleransi untuk menghargai orang lain yang tidak

sependapat dengan kita, serta toleransi untuk menghargai orang lain yang berasal dari luar daerah. Sedangkan pada buku 2 terdapat poin untuk menghargai perbedaan secara umum (semua hal).

b. Nilai Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Sugono, 2013).

Nilai demokrasi dalam buku 1 dibuka dengan petunjuk diskusi kelompok yang terdapat perintah:

“Pilihlah ketua kelompok secara demokratis” atau “Pilihlah pimpinan diskusi secara demokratis”.

Perintah untuk memilih pimpinan kelompok secara demokratis ini sejalan dengan konsep demokrasi itu sendiri sebagai nilai yang harus melibatkan rakyat dalam menentukan keputusan sehingga tercipta sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Latif, 2011).

Nilai demokrasi dalam buku 2 terdapat pada kisah Umar bin Khattab:

“Umar banyak memberi keteladanan kepada kita dalam menjalankan pemerintahan dan menyejahterakan umat atau rakyat seperti mendirikan lembaga keamanan, satuan militer untuk pertahanan dan keamanan, serta ketertiban dalam masyarakat“(Abdullah, 2019).

Nilai demokrasi dalam penggalan kalimat ini ditunjukkan dengan adanya keteladanan Khalifah Umar bin Khattab yang menjalankan roda pemerintahan dalam mencipta kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, karena menurut (Latif, 2011) gagasan demokrasi itu sendiri diantaranya harus melibatkan adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara.

Muatan nilai demokrasi yang terkandung dalam buku 1 dan buku 2 memiliki perbedaan, yakni pada buku 1 memuat demokrasi dalam hal menentukan pilihan serta menyuarakan pendapat yang diaspirasikan melalui musyawarah dalam menetapkan suatu keputusan bersama.

Sedangkan kandungan nilai demokrasi yang terdapat pada buku 2 merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat serta peranan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negaranya, yang dalam buku ini digambarkan dengan kegigihan para kaum *Muhajirin* dan *Anshar* dalam perjuangan untuk mempertahankan kota Madinah.

c. Nilai Kesetaraan

Kesetaraan sinonim dengan kata kesederajadan memiliki arti sama tingkatannya (pangkatnya, kedudukannya) (Sugono, 2013). Ketentuan tersebut bahwasanya manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, dan lain-lain, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengunggulkan sebagian manusia atas sebagiannya yang lain (Muhajir, 2017).

Nilai kesetaraan pada buku 1 ada pada bab 4 dalam keterangan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah terdapat poin:

“Beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia” (H. & F. G. Anwar, 2018).

Kandungan nilai kesetaraan pada hal ini ditunjukkan dengan adanya kewajiban zakat yang dibebankan kepada umat Islam keseluruhan, mulai dari bayi, dewasa, laki-laki ataupun perempuan semuanya memiliki beban syari’at yang sama dalam bab zakat.

Nilai kesetaraan pada buku 2 terdapat pada bab 4 dalam pembahasan zakat. Dalam penjelasan sebuah hadits terdapat keterangan:

“Berdasarkan Hadis di atas, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Zakat fitrah dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya” (Abdullah, 2019).

Sebagaimana pada buku 1, nilai kesetaraan dalam pembahasan zakat ini juga ditunjukkan dengan adanya kewajiban hukum yang sama bagi seluruh umat muslim laki-laki, perempuan, besar (dewasa), kecil (bayi) baik merdeka ataupun budak.

Pada kedua buku tersebut, nilai kesetaraan yang terkandung di dalamnya memiliki persamaan dalam menjelaskan ketentuan hukum zakat bagi seorang muslim. Umat muslim wajib menunaikan zakat baik laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak, dewasa maupun anak-anak, kaya maupun miskin. Sehingga seluruh umat muslim mendapat porsi tuntutan hukum yang sama rata.

Perbedaannya, pada buku 1 terdapat pula kesetaraan dalam memberikan kehormatan yang sama untuk mendamaikan masyarakat yang sedang berselisih. Dalam keterangan ini, digambarkan dengan sikap Rasulullah saw. yang mendamaikan para pemuka kabilah yang berselisih tentang siapa yang paling berhak mengangkat hajar aswad. Sehingga Rasulullah saw. tampil dengan memberikan solusi untuk mengangkat bersama-sama dengan menggunakan selendang.

Sedangkan pada buku 2, di dalamnya memuat kesetaraan dalam memperlakukan seluruh manusia tanpa memandang status sosial baik orang kaya,

miskin, bangsawan maupun rakyat jelata yang digambarkan melalui kisah keteladanan Umar bin Khattab selaku pemimpin negara.

d. Nilai Pluralisme

Pluralisme yang merupakan bentuk persatuan atas keanekaragaman sebagai keniscayaan yang telah menjadi ketetapan Tuhan, akan menjadi sinergitas dan kekuatan apabila dibangun atas kesadaran masyarakat bersama sebagaimana yang terkandung pada buku 1 dan buku 2.

Terdapat nilai pluralisme buku 1 pada bab 5 yang berbunyi:

“Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati, ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke Kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang (*Muhajirin*) dengan kaum *Ansar* sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman” (H. & F. G. Anwar, 2018). Nilai pluralisme ditunjukkan dengan sikap persaudaraan serta kerukunan kaum *Muhajirin* sebagai pendatang dan kaum *Ansar* sebagai pribumi di Madinah yang keduanya saling bersinergi menjaga kedaulatan bersama. Selanjutnya pada bab 6 dalam kandungan *Q.S. al-Hujurat/49: 13* terdapat keterangan: “Anak-anak, Allah Swt. menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa” (H. & F. G. Anwar, 2018).

Nilai pluralisme digambarkan dengan keharmonisan kehidupan kaum *Muhajirin* dan *Anshar* dalam membangun madinah sebagai tempat tinggal bersama. Perbedaan asal suku dan daerah bukanlah pantangan untuk bisa hidup damai berdampingan, hal ini sejalan dengan konsep *Q.S al-Hujurat/49: 13* bahwasanya Allah Swt. menciptakan perbedaan jenis kelamin, bangsa dan suku untuk saling bersosial satu sama lain.

Selain itu, perdamaian antar kabilah yang dipelopori oleh Rasulullah saw. sebagaimana pada buku 1, turut menjadi bukti bahwasanya kesadaran hidup bersama diatas perbedaan merupakan corak realitas kehidupan yang rukun.

e. Nilai Keadilan

Nilai keadilan dapat dipahami sebagai konsep membagi sama rata dan konsep membagi sesuai porsinya. Persamaan nilai keadilan yang terdapat pada kedua buku tersebut adalah keadilan seorang pemimpin dalam memberikan hak dan penegakan keadilan hukum pada rakyatnya yang dalam hal ini digambarkan dengan sosok keteladanan seorang pemimpin Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab.

Kemudian dalam buku 1 terdapat nilai keadilan sama rata dalam membagi tugas bersama yang digambarkan dengan kegiatan gotong-royong.

Pada bab 8 terdapat cerita pada sub bab hidup rukun:

“Agustus tiap tahun, semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil” (H. & F. G. Anwar, 2018).

Sedangkan pada buku 2 terdapat nilai keadilan dalam menjamin kehidupan antar sesama sebagai bentuk realitas sosial, dalam hal ini digambarkan dengan status bahwasanya pada harta orang kaya di dalamnya terdapat haknya orang miskin.

Terdapat pada bab 9 dalam kalimat:

“Ada seseorang yang ditakdirkan hidup dalam kekurangan (miskin), tetapi ada juga seseorang yang ditakdirkan memiliki harta kekayaan yang berlebih (kaya). Seseorang yang ditakdirkan memiliki harta kekayaan yang berlebih dianjurkan oleh Allah Swt. untuk berbagi dan menolong orang-orang yang membutuhkan, karena di dalam harta yang kita miliki tersebut terdapat hak orang lain” (Abdullah, 2019).

Sehingga apabila orang kaya tersebut sadar dan memiliki jiwa yang dermawan, maka antar kebutuhan hidup orang kaya dan miskin, keduanya akan dapat terpenuhi.

f. Nilai Humanisme

Nilai humanisme merupakan apresiasi terhadap jati diri manusia. Seorang manusia harus benar-benar memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dalam memperlakukan orang lain, dalam ungkapan lain dikenal dengan istilah “memanusiakan manusia”.

Nilai humanisme dalam penelitian ini terdapat pada buku 2 yang menunjukkan kemerdekaan hak seutuhnya menjadi manusia. Dalam buku tersebut digambarkan melalui keteladanan Khalifah Abu Bakar yang memerdekakan Zunairah dari status budak tawanan Abu Jahal.

Dalam buku tersebut hanya terdapat satu nilai humanisme yakni pada bab 5 dalam cerita kisah teladan terdapat kalimat:

“Gunjingan orang-orang tentang nasib Zunairah sampailah kepada Abu Bakar. Ia cepat bergegas membawa sekantong besar uang, kemudian Zunairah ditebus dan dibebaskan sebagai budak Abu Jahal” (Abdullah, 2019).

Karena pada dasarnya, kebebasan merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang mendapat kemuliaan dari Allah Swt.

Maka dapat dipahami bahwasanya kedua buku PAI-BP kelas VI tersebut, baik yang diterbitkan oleh Kemendikbud ataupun Kemenag, sama-sama mengandung nilai pendidikan multikultural dengan gaya dan karakteristik masing-

masing yang khas dalam menjelaskan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peranan Pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama dalam menjamin peserta didik agar menyadari keragaman berbangsa dan bernegara yang diaplikasikan melalui bentuk perilaku karakter yang baik

D. Simpulan

Berdasarkan kerangka teoretis dan analisis data yang ditemukan dalam studi pustaka tentang muatan dan komparasi nilai-nilai pendidikan multikultural dengan komponen buku paket siswa mata pelajaran PAI-BP untuk kelas VI SD/MI terbitan Kemendikbud (buku 1) dan terbitan Kemenag (buku 2), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Muatan materi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam buku 1 dan buku 2 merupakan materi pokok pada setiap tema/bab dengan jumlah topik pembahasan pada 10 bab.

Dalam penelitian ini ditemukan muatan nilai-nilai pendidikan multikultural yang dikembangkan di dalam buku 1 yaitu; a) Toleransi; b) Demokrasi; c) Keadilan; d) Pluralisme, dan; e) Keadilan.

Sedangkan pada buku 2 meliputi; a) Toleransi; b) Keadilan; c) Kesetaraan; d) Demokrasi; e) Humanisme, dan; f) Pluralisme.

Perbandingan secara konten materi dalam memuat nilai pendidikan multikultural, memiliki persamaan dan perbedaan dalam memberikan uraian sebagaimana berikut ini:

- a. Nilai toleransi, pada kedua buku tersebut memiliki persamaan dalam memberikan makna toleransi beragama. Perbedaannya, pada buku 1 juga menjelaskan toleransi dalam perbedaan pendapat dan asal daerah, sedangkan pada buku 2 terdapat poin menghargai perbedaan secara umum (mencakup semua hal perbedaan).
- b. Nilai demokrasi, pada buku 1 mengandung makna kebebasan dalam hal menyuarakan pendapat dan menentukan pilihan serta memutuskan suatu perkara dengan jalan musyawarah. Sedangkan pada buku 2, terdapat kandungan nilai demokrasi dalam menjaga kedaulatan negara (kemerdekaan).
- c. Nilai kesetaraan, pada kedua buku tersebut memiliki persamaan makna dalam menerima tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh kaum muslim tanpa terkecuali, yang dalam hal ini adalah kewajiban zakat. Perbedaannya, pada buku 1 terdapat nilai kesetaraan dalam memberikan kehormatan yang sama pada masyarakat yang berbeda suku (kabilah). Sedangkan pada buku 2, terdapat nilai kesetaraan yang digambarkan dengan sikap seseorang dalam memperlakukan orang lain tanpa memandang status sosial.

- d. Nilai pluralisme, memiliki persamaan antara keduanya dalam menjelaskan bahwasanya menerima perbedaan adalah kesadaran yang memberikan dampak positif untuk membangun komitmen bersama.
- e. Nilai keadilan, persamaan nilai keadilan yang terdapat pada kedua buku tersebut adalah keadilan seorang pemimpin dalam memberikan hak dan penegakan keadilan hukum pada rakyatnya. Perbedaannya, pada buku 1 memuat kandungan nilai keadilan dalam membagi dan menjalankan tugas bersama. Sedangkan pada buku 2, terdapat kandungan nilai keadilan dalam mendermakan harta orang kaya kepada orang miskin. Karena di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin.
- f. Nilai humanisme, hanya terdapat pada buku 2 yang menggambarkan sejatinya kebebasan memiliki hak sebagai manusia seutuhnya adalah karunia Allah Swt.

Daftar Rujukan

- Abdullah, N. & K. (2019). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VI Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Amir, H. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Batu: Literasi Nusantara.
- Anwar, H. & F. G. (2018). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Kelas VI SD/MI Edisi Revisi 2018)*. Kemendikbud RI.
- Anwar, S. (2014). *Desain Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. Mengutip Muhaimindan A. Mujib. *Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Operasionalnya*.
- Benyamin, M. F., & Prasetya, A. R. (n.d.). *GLOKALISASI KARYA SENI BATIK INDONESIA SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI MULTIKULTURAL DALAM ERA KOMUNITAS ASEAN*.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Luwihta, A. D. (2016). *Analisis nilai-nilai multikultural dalam buku teks siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas VII SMP*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mahfud, C. (2014). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhajir, K. H. A. (2017). *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD.
- Mulkan, A. H. (2015). *Pengaruh Identitas Sosial Terhadap Kepercayaan dan Norma Kelompok Serta Dampaknya Terhadap Online Helping Behavior pada Forum*

- Online Facebook Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
No, P. P. (19AD). *Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Sugono, D. (2013). *Mahir berbahasa Indonesia dengan benar*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185–200.
- Tahun, U. (2005). tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2006. *Bandung: Citra Umbara*.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan Mestika Zed. Pengarang. *No. Zed, Mestika. Penerbitan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014*.